II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan *locus delicti* dan *tempus delicti* tidaklah mudah. Namun walaupun demikian, penyebutan secara tegas mengenai kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana.

Meskipun *locus delicti* dan *tempus delicti* ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, *locus* dan *tempus delicti* tetap perlu diketahui. *Locus delicti* perlu diketahui untuk :

- 1) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP
- 2) Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relatif.¹⁶

Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

- 1) Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- 2) Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja.

¹⁶ PAF Lamintang, *Op., Cit.*, hlm 180

- 3) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- 4) Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.¹⁷

Tempus delicti adalah penting karena berhubungan dengan:

- 1) Pasal 1 KUHP, untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum
- 2) Pasal 44 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak
- 3) Pasal 45 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum, jika belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan
- 4) Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau *daluarsa*), dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi
- 5) Pasal 57 HIR, diketahuinya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (*opheterda*).

B. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

1. Asas Legalitas

Pada zaman Romawi kuno, suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan jenis pidananya ditentukan raja, tanpa adanya aturan yang jelas perbuatan mana yang dianggap tindak pidana dan jenis pidana apa yang diterapkan. Hal ini dianggap kejam dan sangat bergantung kepada pendapat pribadi raja. Oleh karena itu, pada saat memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut, ide asas legalitas dicetuskan oleh Montesqueau tahun 1748 (*L'esprit des Lois*) dan J.J.

¹⁷ *Ibid*

Rousseau tahun 1762 (*Du Contract Social*) untuk menghindari tindakan sewenang-wenang raja/penguasa terhadap rakyatnya. Asas ini pertama kali disebut dalam Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* (1789), sebuah undang-undang yang keluar pada tahun pecahnya Revolusi Perancis. Selanjutnya Napoelon Bonaparte memasukkan asas legalitas dalam Pasal 4 Code Penal dan berlanjut pada Pasal 1 WvS Nederland 1881 dan Pasal 1 WvSNI 1918. Pasal 1 (1) KUHP mengatur asas legalitas tersebut sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. *Anselm von Feuerbach* dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* (1801) merumuskan asas legalitas dengan “*nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali*” (tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya.¹⁸

2. Konsekuensi Asas Legalitas Formil

Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi:

- a. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
- b. Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

¹⁸ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung. 2011, hlm 12.

Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensi aturan pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif), dasar pikirannya:

- a. menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
- b. berhubungan dengan teori paksaan psikis dari Anselem von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pembedaan terhadapnya.

Di negara-negara yang menganut paham individualistis asas legalitas ini dipertahankan, sedangkan di negara yang sosialis asas ini banyak yang tidak dianut lagi seperti Soviet yang menghapus sejak tahun 1926.

3. Asas Legalitas Materiel

Menurut asas legalitas formil di atas, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. Hal ini menjadikan masalah, jika menurut hukum adat/masyarakat adat ada sebuah perbuatan yang menurut mereka kejahatan, namun menurut KUHP bukan kejahatan (dengan tidak dicantumkan di dalam KUHP). Oleh karena itu dahulu Pasal 14 (2) UUDS 1950 telah menyebutkan aturan ini, bahwa asas legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis. Sedangkan di dalam KUHP hanya menggunakan kata-kata "...perundangundangan..." yang berarti bersifat asas legalitas formil (tertulis).¹⁹

¹⁹ *Ibid*

Dengan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, posisi hukum pidana adat/tidak tertulis tetap diakui. Hal ini di dasarkan pada:

- a. Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951.

Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dengan hukuman yang tidak lebih tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan si terhukum. Bahwa hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas. Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

- b. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Dengan demikian, Indonesia yang mengakui hukum yang hidup yang tidak tertulis. Artinya tidak menganut asas legalitas formil secara mutlak, namun juga berdasar asas legalitas materiil, yaitu menurut hukum yang hidup/tidak tertulis/hukum adat. Artinya suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup/adat dianggap sebagai tindak pidana, walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang pidana, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana. Asas ini berdasar pada Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951 dan Pasal 27 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas.

4. Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP

Rancangan KUHP memperluas eksistensi hukum tak tertulis sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam perundang-undangan. Ini untuk mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan antara kepastian hukum dengan keadilan. Pasal 1 (3) Konsep KUHP menyebutkan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tentang asas legalitas formil, pen.) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.”²⁰

5. Asas Temporis Delicti

Pasal 1 ayat (1) di samping mengandung asas *legalitas* juga mengandung asas *lex temporis delictie* yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili

²⁰ *Ibid*

menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah tindak pidana itu dilakukan maka (Pasal 1 (2)) dipakailah ketentuan yang paling meringankan terdakwa. Konsep KUHP lebih memperinci perubahan undang-undang pidana tersebut. Perincian tersebut merupakan hasil perbandingan dengan KUHP Korea dan Thailand. Selengkapnya Pasal (3) Konsep KUHP menyatakan:

- a. Jika terdapat perubahan undang-undangan sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah tidak dilakukannya perbuatan, maka diterapkan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan.
- b. Jika setelah putusan pembedanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka narapidana dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.
- c. Jika setelah putusan pembedanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka putusan pembedanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru

C. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempatnya

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur berlakunya hukum pidana Indonesia menurut waktu (kapan dilakukannya tindak pidana), maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah dimensi tempat atau dimana berlakunya hukum pidana Indonesia sekaligus juga terkait dengan bagi siapa hukum pidana itu diberlakukan.

Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat ini diatur dalam Pasal 2 s.d. 9 KUHP yang kemudian dikelompokkan menjadi empat asas, yaitu asas teritorial, asas personal (nasional aktif), asas perlindungan (nasional pasif) dan asas universal.²¹

1. Asas Teritorial atau Asas Wilayah

Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Memang menjadi keniscayaan dan logis jika suatu ketentuan hukum suatu negara berlaku di seluruh wilayah negara itu. Asas teritorial dianut oleh Indonesia dan disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 KUHP. Dalam Pasal 2, yang menjadi patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya, siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Paris 13 Oktober 1919, wilayah Indonesia meliputi tanah daratan, laut sampai 12 mil dan ruang udara di atasnya. Laut sampai 12 mil diukur dari titik pantai dari pulau-pulau terluar. Jika berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang jaraknya kurang dari 24 mil, maka diambil titik tengah sebagai batasnya. Yang disebut sebagai wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Indonesia sesuai dengan yang dimaksud pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

²¹ *Ibid*

Wilayah ini kemudian dikukuhkan dengan UU No. 7 Tahun 1976 yang memasukkan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Pasal 3 KUHP kemudian memperluas berlakunya asas teritorial dengan memandang kendaraan air/perahu (*vaartuig*) sebagai ruang berlakunya hukum pidana. Pasal 3 ini tidak memperluas wilayah Indonesia. Arti harfiah *vaartuig* adalah segala sesuatu yang dapat berlayar, yang dapat bergerak di atas air. Namun berdasarkan hukum internasional, kendaraan air yang dapat diberlakukan asas teritorial ini adalah kapal perang dan kapal dagang laut terbuka yang diberlakukan *ius passagii innocui* (ketentuan yang mengatur suatu kapal yang lewat secara damai di wilayah laut negara lain).

Semula Pasal 3 KUHP tidak menyebut adanya kapal udara, karena saat KUHP dibentuk belum dikenal adanya pesawat udara. Namun dengan keluarnya UU Nomor 4 Tahun 1976 bunyi Pasal 3 ini kemudian diubah menjadi: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

2. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti ke manapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga Negara Indonesia ke mana pun ia berada.²²

²² *Ibid*

Dalam KUHP, asas ini diatur dalam Pasal 5 s.d. 7. Pasal 5 ayat (1) ke-1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka diberlakukan hukum pidana Indonesia. Di sini tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut dianggap sebagai kejahatan menurut hukum pidana negara tempat orang Indonesia itu berada. Karena dianggap membahayakan kepentingan negara Indonesia, maka sejumlah pasal dalam Pasal 5 ayat (1) ke-1 tersebut tetap dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia. Pasal 5 ayat (1) ke-2 menentukan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang dianggap kejahatan bagi hukum pidana Indonesia dan di luar negeri tempat tindak pidana dilakukan diancam dengan pidana. Angka ke-2 ini bertujuan agar orang Indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan di luar negeri dan kemudian pulang ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri tidak bebas dari pemidanaan.

Namun demikian, negara Indonesia tidak akan menyerahkan warganya diadili di luar Indonesia. Angka ke-2 ini juga membatasi bahwa yang dapat dipidana adalah yang masuk kategori kejahatan. Artinya, jika ada orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri kemudian pulang sebelum diadili di luar negeri, dan di Indonesia perbuatannya dianggap sebagai pelanggaran, maka tidak akan diadili di Indonesia. Ayat (2) dari Pasal 5 memperluas dalam hal penuntutan. Jadi, apabila ada orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri kemudian melarikan diri ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, tidak membebaskan dia dari penuntutan pidana.

Prinsip keseimbangan dalam asas ini ditunjukkan dalam Pasal 6, bahwa jika di negara tempat dilakukannya tindak pidana tidak diancam dengan pidana mati, maka ketika warga negara Indonesia itu melarikan diri ke Indonesia, di Indonesia juga tidak akan dipidana mati.

3. Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif

Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Asas tersebut juga diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan.²³

Asas perlindungan ini diatur dalam Pasal 4, 7, dan 8 KUHP, diperluas juga dengan UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam KUHP, beberapa tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam asas perlindungan adalah:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat Presiden (Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127, dan 131).
- b. Kejahatan tentang merk atau materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
- c. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas beban Indonesia
- d. Kejahatan jabatan (Bab XXVIII Buku II KUHP)
- e. Kejahatan pelayaran (Bab XXIX Buku II KUHP).

²³ *Ibid*

Tindak pidana-tindak pidana tersebut dianggap menyerang kepentingan negara. Oleh karena itu, asas ini tidak berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan individu/pribadi warga negara di luar negeri.

4. Asas Universal

Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia/internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Di sini, hukum pidana diberlakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas. Siapapun dan di manapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan. Beberapa kejahatan yang dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia berdasarkan asas universal adalah:

- a. Kejahatan mata uang yang dikeluarkan oleh negara tertentu (Pasal 4 sub ke-2 KUHP) yang didasarkan pada Konvensi Jeneva 1929.
- b. Kejahatan perampokan/pembajakan di laut/udara (Pasal 4 sub 4 KUHP yang diperbaharui dengan UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan) yang didasarkan pada Deklarasi Paris 1858, Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971.

Istisna' Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa berlakunya Pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum Internasional. KUHP tidak merinci hukum internasional mana yang membatasi pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, aturan ini cukup luas karena dimungkinkan adanya perubahan-perubahan ketentuan berdasar pada hukum internasional. Pengecualian yang didasarkan pada hukum internasional ini adalah hak imunitas atau exterritorialitas.

Hak imunitas adalah hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap tuntutan pidana dari negara tempat ia melakukan tindak pidana. Hak imunitas ini didasarkan pada Perjanjian Wina 1961 yang dapat diberlakukan bagi:

- a. Kepala negara asing dan keluarganya
- b. Duta besar negara asing dan keluarganya
- c. Anak buah kapal perang negara asing
- d. Pasukan negara sahabat yang berada di wilayah negara atas persetujuan negara yang bersangkutan.

D. Kejahatan Teknologi Informasi

1. Pengertian Kejahatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi selain membawa banyak manfaat dan keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, akan tetapi juga membawa nilai-nilai negatif misalnya sedemikian mudahnya para criminal melakukan tindak kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap paham-paham dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia baik secara lahir maupun batin. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan timbul sejak kejahatan itu sendiri ada.²⁴

²⁴ Reda Manthovani, *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Malibu, Jakarta, 2006, hlm 15.

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat atau Negara yang sedang berkembang, tetapi juga masyarakat atau negara yang sudah maju. kejahatan terjadi tidak hanya terdapat dalam dunia nyata. Tetapi juga terdapat dalam dunia maya dengan formulasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena semakin canggihnya teknologi.

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*), namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer, hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut. secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan didunia *cyber* adalah upaya untuk memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Indra Safitri mengemukakan kejahatan dunia maya adalah jenis-jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dengan diakses oleh pelanggan internet.²⁵ Dengan demikian jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer.

²⁵ Abdul Wahib, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung. 2005, hlm 40

Kejahatan teknologi informasi yaitu komputer dan internet pada masa ini memang telah merajai pergaulan globalisasi kehidupan manusia. kejahatan tersebut dapat timbul dari komputer maupun dari internet yang kita gunakan sebagai media informasi dan kejahatan-kejahatan ini menggunakan teknologi informasi sebagai sasaran utama untuk mewujudkan niat tersebut.

2. Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Komputer dan Internet

Kejahatan teknologi informasi diawali dengan adanya komputer dan internet sebagai sarana manusia untuk menciptakan sesuatu informasi yang berguna bagi dirinya pribadi maupun orang lain. Dengan adanya komputer dan internet ini setiap orang yang menggunakan sarana ini dipaksa terus berpikir untuk menciptakan hal-hal baru untuk kesempurnaan isi dari komputer dan kemajuan serta kelengkapan materi internet tersebut dan terkadang melewati batas wajar manusia dan hal inilah yang menimbulkan kejahatan tersebut.

Istilah komputer berasal dari bahasa asing "*computer*" dengan kata dasar "*to computer*" yang berarti menghitung atau menaksir, namun dalam perkembangannya komputer memiliki fungsi yang lebih luas dari pada sekedar menghitung (*to calculate = calculator*). Sedangkan internet adalah jaringan komputer global atau jaringan yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia dengan menggunakan protokol komunikasi internet protokol. Adanya internet dan komputer memungkinkan masyarakat untuk dapat berkomunikasi dalam bentuk yang lebih bervariasi, tidak seperti telepon yang hanya mampu menyampaikan suara, atau faksimili untuk text dan gambar saja.

Kenyataan bahwa internet adalah penting karena dapat mempermudah masyarakat untuk menemukan apa yang dicari dengan hanya memakai komputer atau internet tersebut keinginan itu terwujud. Ada berbagai definisi mengenai komputer, dari berbagai definisi tersebut setidaknya terungkap dua definisi yang dianggap paling mewakili cirri-ciri komputer:

- a. Serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi/program yang diberikan kepadanya.
- b. Suatu rangkaian peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja dibawah kontrol suatu *operating systems* melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang disebut program, serta mempunyai internal storage yang digunakan untuk menyimpan system-sistem operasi, program dan data yang diolah.

E. Pengertian Penyalahgunaan Kartu Kredit

Salah satu gaya hidup global yang sedang berkembang adalah penggunaan kartu kredit. Dengan kartu kredit di tangan semua jadi mudah, gampang, dan cepat. Ketika berbelanja atau membeli tiket pesawat, membayar rekening dan tagihan, dan sebagainya, kini tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. *Carding* adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk *Carding* adalah murni kejahatan lintas-negara (*trans-national crime*) karena dapat dilakukan oleh siapa saja dari belahan dunia yang berbeda dan system hukum yang berbeda pula. *Carding* merupakan penyalahgunaan kartu kredit dengan menggunakan internet

dan komputer sebagai medianya dan di lakukan secara *online* dengan mencoba nomor-nomor yang ada dengan cara memalsukannya.²⁶

Kartu kredit merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju *metropolitan* atau *cosmopolitan*. Namun demikian, kehadiran kartu kredit sering disalahgunakan. Hal ini dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek. Pertama, dari aspek hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya, menggunakan kartu kredit secara tanpa hak dan tidak sebagaimana lazimnya, Kedua, dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*. *Carding* adalah penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet, *carding* merupakan terminologi yang biasa digunakan para hacker bagi perbuatan yang terkait penipuan menggunakan kartu kredit. *Carding* adalah terminologi yang digunakan hacker untuk mendeskripsikan penggunaan informasi kartu kredit yang dicuri untuk membeli barang dan jasa.²⁷

Jenis kejahatan ini, bila ditinjau dari segi sasarannya termasuk bentuk *cyber crime against property* atau jenis *cyber crime* yang sasarannya property milik orang seseorang. Sedangkan dari modus operandinya, tergolong dalam *computer facilitated crime*, yaitu pola kejahatan umum menggunakan komputer dalam aksinya.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit (Delematis Antara Kontrak dan Kejahatan)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1

F. Penentuan Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan

Undang-undang hanya menghendaki uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Tetapi undang-undang tidak mengatur bagaimana cara merumuskan tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempatnya, agar perumusan itu dipandang telah cermat, jelas dan lengkap atau belum. Dalam praktek dikenal dua cara merumuskan tindak pidana dalam dakwaan. Cara-cara tersebut adalah :

- 1) Pencantuman unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusannya dalam undang-undang (perumusan kualifikasi) yang kemudian disusul dengan uraian fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- 2) Merumuskan tindak pidana tersebut dengan cara langsung mempertautkan antara unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Mengenai tehnik perumusan tindak pidana yang di dakwakan, menurut dalam menyusun surat dakwaan semua unsur perbuatan yang dilakukan harus diuraikan dalam dakwaan, tidak cukup hanya menyebutkan kualifikasi pidananya saja, seperti pencurian, penggelapan, korupsi dan sebagainya. Kata yang dipakai dalam menguraikan surat dakwaan hendaklah dipakai kata sehari-hari yang mudah dimengerti dan dipahami, tetapi yang berhubungan dengan istilah sehingga memudahkan terdakwa dalam menyusun pembelaan dirinya. Di samping itu perlu juga diperhatikan dalam penyusunan dakwaan harus jelas perbuatan delik yang dilanggar, kalau tidak dakwaan akan batal.

Jika semua unsur telah dicantumkan dalam perumusan perbuatan yang bersangkutan, maka walaupun salah satu unsur tidak dinyatakan dalam kualifikasi, hakim akan menganggap tuduhan tersebut memenuhi syarat. Oleh sebab itu adalah lebih baik dalam menyusun suatu tuduhan untuk tidak dimulai lebih dahulu dengan kualifikasi, baru diikuti dengan perumusannya, tetapi hendaknya langsung saja tindak pidana yang dituduhkan, dirumuskan sesuai dengan isi pemeriksaan terdahulu. Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, menentukan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat, jelas dan lengkap, tentang tindak pidana yang didakwakan dan dilengkapi dengan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.